

Judul : Komisi X soroti polemik PPDikti, audit prosedur pengolahan data
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi X Soroti Polemik PPDikti

Audit Prosedur Pengolahan Data

KOMISI X DPR menyoroti polemik dugaan perubahan data alumni dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) diminta melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan data.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak dasar alumni dan kredibilitas sistem pendidikan tinggi nasional. Menurutnya, perubahan data akademik tanpa kejelasan berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik bagi individu maupun institusi.

"Kemendiknas perlu segera memberikan klarifikasi resmi sebagai pengelola PDDikti dan mendorong audit terhadap sistem serta prosedur pengelolaan data," ujar Hadrian,

Jumat (2/1/2026).

Ia menambahkan, klarifikasi harus dibarengi audit menyeluruh untuk memastikan apakah benar terjadi perubahan data. Audit tersebut diperlukan guna mengungkap penyebab pasti, apakah akibat kesalahan sistem atau adanya dugaan intervensi pihak tertentu.

Politikus PKB itu menekankan, penelusuran kasus harus dilakukan secara objektif dan profesional melalui investigasi teknis serta audit forensik digital. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain audit, Hadrian juga mendorong perbaikan sistem PDDikti dan penjatuan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Negara harus hadir melindungi hak-hak alumni agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mene-



Lalu Hadrian Irfani

gaskan, PDDikti merupakan data resmi yang menjadi rujukan untuk ijazah, pekerjaan, hingga studi lanjut. Karena itu, setiap perubahan data harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bisa dianggap sekadar persoalan teknis. "Ini menyangkut hak warga negara dan kredibilitas sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Jika terbukti ada perubahan data tanpa persetujuan pemiliknya, data tersebut harus segera dipulihkan. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem, termasuk penguatan pengamanan dan tata kelola PDDikti, serta penyampaian hasil evaluasi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik.

Kasus ini mencuat setelah alumni Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Ayu Amanda Putri, mengeluhkan dugaan perubahan namanya di PDDikti. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendiknas Togar Mangihut Simatupang menegaskan kasus tersebut telah diselesaikan.

Togar menjelaskan, kejadian itu terdeteksi akibat kegagalan proses internal sistem atau kesalahan teknis. Ia menyebut operator PDDikti di perguruan tinggi memiliki kewajiban mel-

porkan data mahasiswa secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi Feeder atau Neo Feeder.

Pelaporan data, lanjutnya, harus mengikuti standar Kemendikbudristek, termasuk menjaga kerahasiaan data dan mematuhi periode pelaporan. Karena itu, peningkatan mutu keamanan data perlu terus dilakukan.

Togar menambahkan, pemutakhiran data PDDikti tidak dilakukan secara real time, melainkan secara periodik. Setiap galat dalam sistem harus segera terdeteksi dan dikoreksi.

Menurutnya, kasus yang dialami Ayu Amanda Putri telah tertangani dan data yang bersangkutan kini sudah disesuaikan. Ayu juga menyatakan identitasnya telah kembali sesuai dengan data di PDDikti, seraya berharap peristiwa serupa tidak terulang dan sistem pendidikan tinggi terus diperbaiki. ■ PYB